

**PERANAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(SUATU STUDY DI KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
KABUPATEN MINAHASA UTARA)**

ISMAIL RACHMAN

One of the government entity is to give direct and indirect service to the society in the district or Kecamatan. As the government sub-system in Indonesia, Kecamatan has the strategic position to play the functional role in governance, service, administration, development also for the society itself. Camat has important role in implementing the society's empowerment. The empowerment model by the government is to give positive impact in business development and economic empowerment for the society. Through certain program, so many benefit can be obtained by the society in order to create society's improvement in culture, social and economic in Likupang Timur.

Keywords; The role of Sub-district Head, Community Empowerment

P E N D A H U L U A N

Salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah Kecamatan. Sebagai sub system pemerintahan di Indonesia, maka Kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Sebagai suatu organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, Kecamatan menghadapi banyak masalah. Sebagai organisasi administratif, maka masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan misalnya dengan masalah yang bersifat politis. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitas nya (asal usul, pendidikan, umur, maupun kemampuan ekonomi), karakteristik wilayah maupun banyaknya desa/kelurahan di lingkungan kerjanya. Studi tentang Kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D. Fagg tahun 1958 yang mengkaji Camat dengan

kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Scohlte Nordholt (1987) yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan Camat dengan Lurah dan berbagai kajian lainnya yang berhubungan dengan peran Kecamatan dan Camat.

Menurut Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin dan M. Fahrurrosi (2009) bahwa jabatan Camat dan organisasi Kecamatan merupakan perangkat daerah yang khas dan memiliki karakteristik berbeda dengan perangkat daerah maupun organisasi pemerintah daerah lainnya. Jabatan Camat disamping memimpin satu unit pemerintahan yang menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang multi sektoral juga melaksanakan tugas-tugas kewilayahan (territorial) karena memiliki wilayah kerja . Dengan demikian Camat diharapkan memiliki kemampuan sebagai generalis sekaligus spesialis. Tuntutan untuk menjadi pejabat generalis karena camat melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang melingkupi semua bidang urusan pemerintahan sepanjang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Camat memerlukan kemampuan specialis karena bidang urusan pemerintahan yang diterimanya memerlukan penguasaan serta spesialisasi dalam

pembinaan wilayah kerja yang memiliki dinamika dan kompleksitas masalah yang luas. Salah satu tugas penting yang dimiliki oleh Camat adalah dalam melaksanakan tugas pemberdayaan kepada masyarakat dalam pembangunan. Alasannya karena dengan tugas yang dilakukan oleh Camat terhadap pemberdayaan masyarakat maka secara langsung Akan membangkitkan semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Camat sebagai pelaksana tugas yang dipercayakan oleh pemerintah kemudian melalui pemberdayaan masyarakat maka partisipasi dapat membantu kegiatan perencanaan pembangunan, hal ini sangat berkaitan dengan suatu proses dalam menetapkan tujuan, menetapkan kebutuhan, menetapkan skala prioritas serta alternatif-alternatif kegiatan yang akan dikerjakan dan bagaimana menetapkan kegiatan tersebut. Proses ini akan menimbulkan rasa memiliki (*sense of belonging*) sehingga pada akhirnya tumbuh rasa tanggung jawab masyarakat terhadap program yang telah direncanakan, dengan demikian maka dengan pemberdayaan akan dapat membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Likupang Timur dengan menitikberatkan pada : Peranan Camat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam penentuan informan sebanyak 7 orang dengan ketentuan dipilih informan kunci dan informan pelengkap.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada metode penelitian kualitatif. Dimana metode ini tidak bermaksud untuk mencari hubungan sebab akibat dari sesuatu melainkan berusaha memahami situasi dan latar tertentu sebagaimana adanya.

Semiawan (Dalam Moleong, 1996) mengemukakan bahwa Dilthy dan Spranger mengintroduksi istilah Verstehen (Understanding). Verstehen bermaksud menangkap makna dari sudut pandang pelaku yang menghayati kejadian tersebut melalui pengamatan si peneliti yang bersifat partisipatif. Penelitian kualitatif mencoba memahami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana yang disajikan dalam situasinya.

Menurut Moleong (1996) pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah. Demikian pula di dalam alam ini tidak ada masalah, hanyalah manusia itu sendiri yang mempersepsikan adanya masalah itu. Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan Fokus.

Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus maka seorang peneliti akan tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang dianggap menarik, atau tidak relevan. Suatu hal yang perlu diketahui bahwa penetapan fokus mungkin saja berubah, tetapi perubahan seperti itu menurut Moleong (1996) merupakan suatu hal yang lazim bahkan sangat diharapkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini maka fokus yang diarahkan dengan menekankan pada : Peranan Camat dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat ; Berbagai hambatan yang ditemui bagi peranan Camat dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan dengan menekankan pada berbagai daftar pertanyaan yang telah diedarkan kepada responden secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Terstruktur artinya penulis berpatokan pada pertanyaan yang diarahkan melalui para peneliti dan diarahkan pada fokusnya. Sedangkan tidak terstruktur artinya

mencoba memahami latar belakang terdalam yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (Suparyogo, 2001) tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Oleh karena itu data kualitatif yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan penjelasan kualitatif. Dalam analisis ini, apa yang ditemukan tidak hanya cukup dijelaskan, dengan apa adanya, tetapi penulis juga menginterpretasikannya. Sebagaimana layaknya dalam penelitian sosial maka data dapat dideskripsikan, diinterpretasikan, dan diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Program pembangunan di wilayah Kecamatan masih menjadi prioritas utama karena Camat memiliki peranan yang sangat strategis terutama dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sadu Wasistiono dkk, (2009) dikatakan bahwa jabatan Camat dan organisasi Kecamatan merupakan perangkat daerah maupun organisasi pemerintah daerah lainnya. Jabatan Camat disamping memimpin satu unit pemerintahan yang menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang multi sektoral juga melaksanakan tugas-tugas kewilayahan (territorial) karena memiliki wilayah kerja.

Dengan demikian Camat diharapkan memiliki kemampuan sebagai generalis sekaligus spesialis. Tuntutan untuk menjadi pejabat generalis karena Camat melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang melingkupi semua bidang urusan pemerintahan sepanjang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Sedangkan Camat memiliki kemampuan spesialis karena bidang urusan

pemerintahan yang diterimanya memerlukan dinamika dan kompleksitas masalah yang luas.

Menurut Unifah Rosidi (2007) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan fungsi beragam jenis pelayanan pada masyarakat ataupun menjalankan tugas khusus pada satu bidang.

Studi tentang Kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D. Fagg tahun 1958 yang mengkaji Camat dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Scohlte Nordholt (1987) yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan Camat dengan Lurah dan berbagai kajian lainnya yang berhubungan dengan peran Kecamatan dan Camat.

Menurut Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin dan M. Fahrurrosi (2009) bahwa jabatan Camat dan organisasi Kecamatan merupakan perangkat daerah yang khas dan memiliki karakteristik berbeda dengan perangkat daerah maupun organisasi pemerintah daerah lainnya. Jabatan Camat disamping memimpin satu unit pemerintahan yang menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang multi sektoral juga melaksanakan tugas-tugas kewilayahan (territorial) karena memiliki wilayah kerja. Dengan demikian Camat diharapkan memiliki kemampuan sebagai generalis sekaligus spesialis. Tuntutan untuk menjadi pejabat generalis karena Camat melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang melingkupi semua bidang urusan pemerintahan sepanjang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Camat memerlukan kemampuan spesialis karena bidang urusan pemerintahan yang diterimanya memerlukan penguasaan serta spesialisasi dalam pembinaan wilayah kerja yang memiliki

dinamika dan kompleksitas masalah yang luas.

Unifah Rosidi (2007) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan fungsi beragam jenis pelayanan pada masyarakat ataupun menjalankan tugas pelayanan khusus pada satu bidang serta dalam kaitan dengan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin dan M. Fahrurrosi (2009) bahwa Urusan yang menjadi kewenangan Camat meliputi Lima bidang kewenangan pemerintahan yaitu: Bidang pemerintahan, Bidang pembangunan dan ekonomi, Bidang pendidikan dan kesehatan, Bidang sosial dan kesejahteraan, Bidang pertanahan. Tugas Camat dalam bidang sosial dan kesejahteraan adalah dalam kaitan dengan tugas pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan dalam PP No. 19 tahun 2008 Pasal 15 ayat (1) tentang Kecamatan disebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan pada point (1) adalah berkaitan dengan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian dari apa yang dikemukakan diatas, maka Camat memiliki peran yang cukup luas dan kompleks. Salah satu tugas Camat yang cukup penting sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa salah satu tugas Camat adalah melaksanakan pelayanan yang menjadi ruang lingkup wilayah kerjanya. Tugas pelayanan yang dilakukan oleh Camat menjadi sangat penting, karena Camat disamping sebagai pelaksana tugas dibidang pemerintahan juga berfungsi untuk memberikan pelayanan dan pembinaan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Peran camat dalam membantu kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan adalah usaha untuk membina dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena betapapun besarnya peran pemerintah yang dilakukan tanpa disertai dengan partisipasi masyarakat,

maka segala program yang dicanangkan oleh Camat kepada masyarakat tidak akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu peran Camat dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan sangat diperlukan.

Besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan tentu ada hubungannya dengan pemberdayaan. Kalau masyarakat tidak diberdayakan maka akan berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi. Tugas camat dalam melakukan pemberdayaan akan berdampak luas pada peningkatan partisipasi.

Pada beberapa dekade strategi pembangunan yang pernah dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan strategi Top Down Planning, tidak berhasil atau banyak mengalami kegagalan, hal ini tentu sangat berkaitan dengan peran pemerintah yang tidak mengena sasaran, karena telah mengabaikan masyarakat. Akhir-akhir ini pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan pola pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dengan menempatkan strategi Bottom Up Planning. Strategi ini sangat dirasakan karena berdampak luas terhadap peran pemerintah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan, oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Bryant dan White (1982), prakarsa dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas (*top down* dan *bottom up*) itu penting berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain: bahwa melalui prakarsa dari atas ke bawah masyarakat dapat memberi tanggapan laporan dan keluhan *feedback* kepada pihak atas mengenai hal-hal yang menyangkut jawaban, tanggapan laporan dan keluhan. Jika seorang warga masyarakat tidak bebas untuk menyatakan pendapatnya mengenai suatu hal yang menyangkut usaha perbaikan atau kegiatan sosial, yang bersangkutan telah kehilangan daya lindung atau pertahanannya selaku anggota masyarakat, bahwa melalui prakarsa dari bawah ke atas, masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi.

Permintaan atau tuntutan kepada pemerintah. Sebagai metode pembangunan masyarakat melayani usaha pencapaian tujuan demokrasi yang tinggi. Semangat pembangunan masyarakat berakar dari prinsip-prinsip demokrasi murni. Melalui pembangunan maka masyarakat terus menerus dididik untuk dapat menghargai prinsip-prinsip demokrasi. Hal inilah yang dapat menimbulkan rasa tanggungjawab masyarakat, rasa wajib untuk mengusahakan kepentingan bersama dan semangat kerjasama. Sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha dalam Walmaliki (1999) adalah : bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai satu titik awal perubahan sosial, Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya, Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana), Partisipasi dalam perencanaan operasional pembangunan, Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan dan Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka Camat memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas pemberdayaan kepada masyarakat dalam pembangunan. Alasannya karena dengan tugas yang dilakukan oleh Camat terhadap pemberdayaan masyarakat maka secara langsung akan membangkitkan semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Camat sebagai pelaksana tugas

yang dipercayakan oleh pemerintah kemudian melalui pemberdayaan masyarakat maka partisipasi dapat membantu kegiatan perencanaan pembangunan, hal ini sangat berkaitan dengan suatu proses dalam menetapkan tujuan, menetapkan kebutuhan, menetapkan skala prioritas serta alternatif-alternatif kegiatan yang akan dikerjakan dan bagaimana menetapkan kegiatan tersebut. Proses ini akan menimbulkan rasa memiliki (*sense of belonging*) sehingga pada akhirnya tumbuh rasa tanggung jawab masyarakat terhadap program yang telah direncanakan, dengan demikian maka dengan pemberdayaan akan dapat membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dalam kaitan dengan tugas Camat terhadap pemberdayaan masyarakat maka ada berbagai program yang dilaksanakan. Tugas ini menjadi penting sehubungan dengan kerjasama program pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan Meaning Sopotan Meares (MSM) dalam kaitan dengan tugas pemberdayaan atau yang dikenal dengan program CSR. (Corporate Social Responsibility). Program ini telah dicanangkan sejak tahun 2007 sampai saat ini dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Utara mencanangkan program Piagam Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan MSM dalam program CSR, sehingga pemerintah Kabupaten juga memberikan kewenangan kepada Camat selain tugas-tugas yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah dan petunjuk dari Undang-Undang.

Program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Kecamatan dengan program pemberdayaan masyarakat (CSR) antara lain:

1. Program bidang Pendidikan
2. Program bidang Kesehatan
3. Pembangunan Desa
4. Program Unggulan antara lain melalui bidang pertanian, Perikanan, Sektor Informal, Peternakan.

Untuk membuktikan sejauhmana keberhasilan program Camat dalam kaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan kepada

masyarakat maka akan dapat dibuktikan lewat hasil penelitian berikut ini.

1. Bidang Pendidikan

Program bidang pendidikan merupakan salah satu program yang menjadi prioritas dalam pembangunan masyarakat di Minahasa Utara terutama untuk meningkatkan sumberdaya manusia, karena memang harus diakui bahwa Bidang pendidikan di wilayah Kecamatan selama ini masih menjadi kendala terutama untuk dapat menyediakan tenaga-tenaga trampil.

Program bidang pendidikan yang dicanangkan oleh Camat telah dirasakan oleh masyarakat terutama dapat membantu untuk pembiayaan study mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Manfaat yang dirasakan antara lain melalui pemberian Beasiswa bagi murid dan Mahasiswa, pemberian Honor bagi guru-guru, serta berbagai pembangunan fisik atau gedung sekolah.

Dari berbagai bantuan terutama dibidang pendidikan dalam kaitan dengan program pemberdayaan kepada masyarakat dapat menyentuh langsung masyarakat sasaran terutama bagi para siswa, Mahasiswa dan Guru-guru/tenaga pendidik.

2. Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan bidang kesehatan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan bidang kesehatan, karena untuk menciptakan hidup sehat haruslah dimulai dari masyarakat, karena tanpa adanya peran masyarakat maka program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak akan dapat berhasil dengan baik.

Pemerintah berupaya untuk melaksanakan program pembangunan kesehatan lewat program yang dicanangkan untuk meningkatkan Gizi Keluarga, program untuk pengendalian kelahiran lewat program Keluarga Berencana, melalui para Ibu Hamil dan anak-anak Balita serta program untuk

menanggulangi sebelum dan sesudah melahirkan lewat pemberian bekal pengetahuan kepada para Dukun terlatih. Program ini juga menjadi sasaran antara bagi pembangunan kesehatan terutama untuk dapat menciptakan masyarakat yang hidup sehat Bahagia dan Sejahtera. Oleh karena itu pemerintah lewat Camat melaksanakan program pemberdayaan bidang kesehatan yang dapat memfasilitasi berbagai bantuan dana dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat sasaran.

3. Bidang Pembangunan Desa

Pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat desa sudah lama dilaksanakan, namun hasilnya belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat desa. Buktinya ada desa-desa yang sudah berkembang menjadi desa yang mandiri, namun ada desa-desa yang melaksanakan pembangunannya masih bersifat stagnan dari tahun ketahun belum dapat berkembang secara nyata.

Begitu pula dengan pelaksanaan pembangunan desa di wilayah Likupang Timur program pelaksanaan pembangunan desa yang dicanangkan oleh pemerintah Daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal, pemberian bantuan untuk kepentingan pembangunan desa belum mampu untuk memberdayakan masyarakat.

Walaupun di desa masih terdapat sumberdaya alam yang melimpah ruah, namun kekayaan alam yang tersedia tersebut belum dapat dirasakan secara nyata oleh para penduduknya. Pada hal kalau dikelola secara intensif, maka sumberdaya alam yang tersedia akan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Ada berbagai masalah yang turut menghambat belum begitu optimalnya pelaksanaan pembangunan desa khususnya di wilayah Kecamatan Likupang Timur antara lain : (1) terbatasnya kemampuan aparat pemerintah Desa (2) belum dapat

dikelolanya sumberdaya alam sebagai pemberi kontribusi bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, (3) Sikap mental masyarakat dalam membangun yang masih sangat lemah yang dipengaruhi oleh rendahnya latar belakang pendidikan, (4) Kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan motivasi dan bantuan baik sarana fisik maupun non fisik untuk kepentingan pembangunan desa.

Keempat masalah tersebut diatas masih menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk memberikan kemajuan yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan desa, tentu akan dibutuhkan kemampuan yang optimal dari pemerintah dalam hal ini dibutuhkan kemampuan Camat dalam memberdayakannya agar dengan demikian melalui pemberdayaan dibidang pembangunan desa maka akan dapat membangkitkan semangat dan gairah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

B. Berbagai Hambatan yang ditemui bagi peranan Camat dalam pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat.

Model pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini diberikan kewenangan kepada Camat memberikan dampak yang positif dalam pengembangan usaha bagi ekonomi kerakyatan. Melalui program unggulan ada banyak manfaat yang diperoleh bagi masyarakat penerima dana bantuan tersebut antara lain :

1. Bentuk kerjasama dengan kelompok dapat membawa perubahan sosial bagi kelompok itu sendiri dimana mereka dapat memperoleh informasi secara lebih cepat mengenai hal-hal baru,
2. Memberikan pemahaman dan wawasan yang sangat luas bagi kelompok karena ada sentuhan pengetahuan yang diperoleh lewat kelompok dan setiap ada

permasalahan selalu dipecahkan secara bersama,

3. Setiap anggota kelompok telah dapat menikmati hasil dan manfaat dari pemberian dana tersebut sehingga prospeknya mereka dapat memperluas usaha secara berkesinambungan
4. Proses pemberdayaan menginginkan usaha yang mandiri sehingga dapat memberikan pengaruh yang sangat positif untuk ketahanan pangan dan lumbung produksi desa
5. Melalui kerja kelompok mereka dapat belajar mengatasi berbagai permasalahan dan mengatasi segala rintangan dan hambatan

Ditengah keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Camat kepada masyarakat sasaran memang banyak mengalami berbagai kemajuan, namun ada juga hambatan yang sering ditemui diwilayah kerja Camat dalam kaitan dengan proses pemberdayaan antara lain :

1. Hambatan yang mempengaruhi program Camat bahwa dalam kelompok setiap anggota menginginkan perubahan dan kemajuan tetapi apabila terjadi kegagalan maka anggota yang bersangkutan akan bersifat pasif dengan perubahan yang ada ditambah lagi dengan hambatan-hambatan struktural sikap mental masyarakat dengan pola hidup konsumtif, ketergantungan dengan tradisi, sikap boros masih saja tampak dalam tataran masyarakat desa kalau mereka sudah mendapatkan hasil maka yang bersangkutan akan berfesta fora atau bersikap memboroskan segala keuntungan yang didapat,
2. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat penerima dana akan menghambat proses perubahan dan pemberdayaan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan memiliki wawasan yang sempit terhadap proses perubahan, terutama dalam kaitan dengan pengembangan

usaha mereka. Pemberdayaan masyarakat juga harus dimulai dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan berpikir dan prosesnya harus dimulai dari pendidikan informal yang harus dilakukan sedini mungkin.

3. Program penanggulangan kemiskinan dengan pemberian dana kepada masyarakat melalui Raskin dan BLT tidak akan menyelesaikan masalah karena yang diperlukan hanya proses jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak untuk ketahanan pangan dan lain-lain pada hal yang diperlukan adalah bagaimana investasi dari program tersebut akan menjadi modal sosial dimasa depan secara berkesinambungan, jadi bukanlah pertumbuhan sebagai dampak dari kebijakan pemberdayaan tetapi yang diperlukan adalah pemenuhan kebutuhan jangka panjang seperti yang dikemukakan oleh Nasikun (1996) bahwa permasalahan pembangunan di Indonesia masih bertumpu pada teori pertumbuhan makanya selalu dinilai adalah GNP atau di daerah dikenal dengan PDRB atau gini ratio dari proses pertumbuhan sedangkan pemenuhan kebutuhan masih terabaikan. Masyarakat dengan pemberian dana tersebut melalui dana BLT dan Raskin akan merasa ketergantungan yang lebih besar dari dana tersebut, dan mereka tidak mau lagi berpikir untuk maju karena sudah terbiasa dengan bantuan dari pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat menguraikan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Camat memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas pemberdayaan kepada masyarakat dalam pembangunan. Model pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini diberikan kewenangan kepada Camat memberikan

dampak positif dalam pengembangan usaha bagi pemberdayaan ekonomi rakyat. Melalui program unggulan ada banyak manfaat yang diperoleh bagi masyarakat penerima dana bantuan sehingga menghasilkan bentuk perubahan sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Likupang Timur.

2. Hasil penelitian membuktikan pula bahwa program unggulan yang dicanangkan oleh Camat sebagai pelaku pemberdayaan membawa kemajuan positif bagi kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari realisasi bantuan yang diberikan dalam kaitan dengan program pemberdayaan antara lain Bidang pendidikan, kesehatan, sektor informal, pertanian, perikanan, peternakan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Ditengah keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Camat kepada masyarakat sasaran memang banyak mengalami berbagai kemajuan, namun ada juga hambatan yang sering ditemui diwilayah kerja Camat dalam kaitan dengan proses pemberdayaan antara lain :
 - a. Hambatan-hambatan struktural sikap mental masyarakat dengan pola hidup konsumtif, ketergantungan dengan tradisi, sikap boros akan turut mempengaruhi peningkatan terhadap pemberdayaan masyarakat
 - b. Tingkat pendidikan masyarakat penerima dana masih cukup rendah hal ini akan menghambat proses perubahan dan pemberdayaan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan memiliki wawasan yang sempit terhadap proses perubahan, terutama dalam kaitan dengan pengembangan usaha mereka. Pemberdayaan masyarakat juga harus dimulai

dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan berpikir dan prosesnya harus dimulai dari pendidikan informal yang harus dilakukan sedini mungkin.

- c. Program penanggulangan kemiskinan dengan pemberian dana kepada masyarakat melalui Raskin dan BLT tidak akan menyelesaikan masalah karena yang diperlukan hanya proses jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak untuk ketahanan pangan dan lain-lain pada hal yang diperlukan adalah bagaimana investasi dari program tersebut akan menjadi modal sosial dimasa depan secara berkesinambungan .
- B. Saran-Saran
1. Program pemberdayaan sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Melalui hasil penelitian ini kiranya program pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan secara berkesinambungan
 2. Berhasilnya program pemberdayaan akan berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui kesempatan ini perlunya lebih membangkitkan gairah partisipasi masyarakat sebagai salah satu strategi Bottom up planning dalam pelaksanaan pembangunan desa,
 3. Hendaknya Camat dalam realisasi yang dicanangkan melalui program unggulan terhadap pemberdayaan masyarakat melakukan kaji tindak atau evaluasi bagi kelompok-kelompok sasaran yang kurang berhasil.
 4. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana penunjang bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad A. 2001, Model Kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan Kewirausahaan bagi wanita pada lembaga kursus, Disertase Doktor pada PPs UPI Bandung.
- Ahmad M dan Coombs P.H. ,1977 , Education for Rural Development , Case Studies for Planners. New York, Prager Publishers.
- Anwar,2006 , Kajian Naskah Lontarak Assalena Bajo (Lontarak asal usul suku bajo) , Jakarta Program penggalangan Kajian sumber-sumber tertulis nusahntara, Ditjen pendidikan Tinggi DepDikNas.
- Abdul, A. D., 1985. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berencana*. Desertasi. Universitas Pajajaran. Bandung.
- Borrini G. 1991, Lessons learned in Community Based Environment Management Rome : Internatinale Communication for PHC Managers at District level in
- Batten. T.R., 1978, *Comunities and Their Development*, OxFord Univ. Press.
- Bhattacharryya,1972, *Administrative Organization for Development HAS* ,Brussels.
- Bayu Suryaningrat,2004, Adaministrasi Pemerintahan Desa, Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- Bryant C. dan L.G. Whyte, 1982. *Managing Development in The World*. Westview, Boulder, Colorado.
- Chambers. Robert , 1988, *Pembangunan Desa mulai dari belakang*, Jakarta LP3ES.
- Cary. L.J. , 1970 *Community Development As a Proces*, Colombia Missouri. Developing Countries.
- Collins 1975, *Conflict Sociology*, University Chicago
- Cohen, J. M. and N. T. Uphoff, 1979. *Rural Development Participation*, Cornnel University. New York.

- D.D. Fagg 1958, *Authority and Social Structure: a Study in Javanese bureaucracy* Camberige, Masschusetts, Harvard University (Microfilm).
- Friedmann 1992 John Empowerment The Politics Of Alternative Development Cambrige Mass Blackwell Publisher.
- Freire, Paulo & L. Shor 1987, *A Pedagogy for Liberation*, London Macmillian.
- Ginandjar Kartasmita 1996, *Kemiskinan*, Jakarta Balai Pustaka.
- Hulme David, dan M. Turner 1990, *Sosiologi Of development Theories, Politics and Practices Hertfordshire Harvester Whealsheaf*.
- Lewis. A. Coser, 1956, *The Functions of Social Conflict*
- Karl 1995, *The Measurement of Modernism : A Study Of Values in Brazil and Mexico* , Austin: The University Of Texas Press.
- Kassam,1989, *Approaches to Participation in Rural Development* Geneva, ILO.
- Misra,1981 *Rural Development National Policies and Experiences*, Maruzen Asia Nagoya.
- Ndraha, Taliziduhu,2003, . *Partisipasi Masyarakat Desa di Beberapa Desa*. Yayasan Karya Dharma, Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 2004, *Pembangunan Masyarakat mempersiapkan masyarakat Tinggal Landas*, PT Gramedia Jakarta.
- Randal Pearse ,Andrew dan Michael Stiefel 1979 ,*Inequality into Participation : A Research Approach*, Geneva UNRISD.
- Paul Samuel, 1987, *Community Participation in Development Projects- the World Bank Experience* ,Whosington DC; The World Bank.
- Robert Dahl, 1983 , *Democracy and its Critics*, New Haven Conn, Yale University Fress.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Silalahi, T.B. 1999, *Manajemen Partisipasi*, CV Rajawali Jakarta.
- Raharjo Dawam 1983, *Partisipasi Masyarakat Desa dalam pembangunan* ,Pradnya Paramita.
- Sadu Wasistiono , Ismail Nurdin dan M. Fahrurrosi 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan, dari Masa ke masa*,Penerbit Fokus Media Jakarta.
- Slamet Y, 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Shragge Eric, 1996, *Community Economic Development dalam Tim Allen dan Alan Thomas, Poverty and Development in the 1990s* Oxford Open university Press.
- Shatty. S. 1991, *Development Project in Asssesing Empowerment* ,Occasional Paper Series No. 3 New Dehli Society for Participatory Research In Asia.
- Soedomo M , 1989, *Pendidikan luar sekolah kearah pengembangan system belajar masyarakat* , Jakarta P2LPTK DepDikNas.
- Soedjatmoko M. 1983 , *Pembangunan sebagai proses belajar dalam Basis* , Yayasan BP-Basis, Yokyakarta.
- Sudjana. D. , 2000, *Managemen program pendidikan untuk pendidikan luar sekolah* , Bandung Nusantara Press.
- Unifah Rosidi 2007, *Reformasi Administrasi Sub Nasional suatu analisis reformasi administrasi Kecamatan di Kota Bogor*,Ringkasan Disertasi Universitas Indonesia.
- Vilfredo Pareto, 1869, *Trattatadi Sociologie Generale*
- Walmaliki, W. 1999. *Beberapa Faktor Sosial Ekonomi yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sub DAS Marawas di DAS Tondano*. Tesis Program Pascasarjana-Universitas Sam

Ratulangi, Manado. Tidak
Diterbitkan.

W.J.S. Poerwadarminta 2006, *Kamus Umum
Bahasa Indonesia* Penerbit Balai
Pustaka Nasional.

Sumbers-sumber lain :

- PP No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan
- Keputusan Mendagri No. 158 tahun 2004,
tentang pedoman organisasi Kecamatan

- UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera
Utara Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 13
Januari 2006 tentang Pembentukan
Kecamatan-Kecamatan Dalam Daerah
Kabupaten Halmahera Utara.